**KEPALA DESA PANDESARI
KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG**

**PERATURAN DESA PANDESARI
NOMOR 4 TAHUN 2024**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

**DESA PANDESARI
KECAMATAN PUJON
KABUPATEN MALANG
TAHUN 2024**

**KEPALA DESA PANDESARI
KECAMATAN PUJON KABUPATEN MALANG**

**PERATURAN DESA PANDESARI
NOMOR 4 TAHUN 2024**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDESARI,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan dan belanja, perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
18. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 352 Tahun 2024 tentang Rincian Insentif Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2024;
19. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : 100.3.3.1/589/KPTS/013/2024 tentang Penetapan Pagu Anggaran Definitif Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa yang Diverifikasi oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2024;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun

- 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 6 Seri A);
 23. Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 16 Seri D) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 25 Seri D);
 24. Peraturan Bupati Malang Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 17 Seri D);
 25. Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2018 Nomor 12 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang Nomor 195 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2020 Nomor 11 Seri A);
 26. Peraturan Bupati Malang Nomor 124 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 124 Seri D);
 27. Peraturan Bupati Malang Nomor 202 Tahun 2022 tentang Pendapatan Kepala Desa, Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Insentif Ketua Rukun Tetangga serta Ketua Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 Nomor 202 Seri D);
 28. Peraturan Bupati Malang Nomor 130 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Desa Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2023 Nomor 130 Seri A);

29. Peraturan Bupati Malang Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2024 Nomor 29 Seri A);
30. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/963/KEP/35.07.013/2023 tentang Besaran Alokasi Dana Desa Pada Setiap Desa di Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2024;
31. Keputusan Bupati Malang Nomor : 188.45/671/KEP/35.07.013/2023 tentang Desa/Kelurahan Prioritas Penurunan Stunting Kabupaten Malang Tahun 2024;
32. Peraturan Desa Pandesari Nomor 21 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2018 Nomor 21);
33. Peraturan Desa Pandesari Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2019 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Desa Pandesari Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Pandesari Nomor 11 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2024 Nomor 2);
34. Peraturan Desa Pandesari Nomor 3 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pandesari (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2022 Nomor 3);
35. Peraturan Desa Pandesari Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Pandesari Tahun 2024 (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2023 Nomor 2);
36. Peraturan Desa Pandesari Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pandesari Tahun 2024 (Lembaran Desa Pandesari Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDESARI
dan
KEPALA DESA PANDESARI**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024**

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp. 2.916.884.000,00 bertambah sejumlah Rp. 671.876.183,12 sehingga menjadi Rp. 3.588.760.183,12 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa:		
a. Semula	Rp.	2.916.884.000,00
b. Bertambah	Rp.	<u>671.876.183,12</u>
c. Jumlah pendapatan setelah Perubahan	Rp.	3.588.760.183,12
o Rincian Sumber Pendapatan Desa setelah Perubahan :		
1) Pendapatan Asli Desa (PAD)	Rp.	411.815.000,00
2) Pendapatan Transfer (DD, ADD, BHP, BKD PROVINSI)	Rp.	3.069.835.000,00
a) Dana Desa (DD)	Rp.	1.620.898.000,00
b) Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp.	752.187.000,00
c) Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten (BHP)	Rp.	246.750.000,00
d) Bantuan Keuangan Provinsi (BKD Provinsi)	Rp.	450.000.000,00
3) Pendapatan Lain-lain (PLL)	Rp.	107.110.183,12
2. Belanja Desa:		
a. Semula	Rp.	2.748.054.600,00
b. Bertambah	Rp.	<u>715.705.583,12</u>
c. Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.	3.463.760.183,12
d. Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp.	125.000.000,00
o Rincian Belanja Desa setelah Perubahan :		
1) Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	1.375.749.208,96
2) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp.	1.432.900.200,00
3) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	215.724.774,16
4) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	357.386.000,00
5) Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp.	82.000.000,00
3. Pembiayaan Desa:		
3.1 Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	57.534.336,93
b. Bertambah/ Berkurang	Rp.	<u>0</u>
c. Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.	57.534.336,93
3.2 Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp.	226.363.736,93
b. Bertambah/ Berkurang	Rp.	<u>43.829.400,00</u>
c. Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		182.534.336,93
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp.	(125.000.000,00)
Selisih Pembiayaan dan Belanja	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pandesari.

Ditetapkan di Pandesari
Pada tanggal 24 Oktober 2024

Diundangkan di Pandesari
Pada tanggal 25 Oktober 2024

SEKRETARIS DESA PANDESARI,

SUYONO

LEMBARAN DESA PANDESARI TAHUN 2024 NOMOR 4

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PANDESARI
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	411.215.000,00	411.815.000,00	600.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	11.215.000,00	10.400.000,00	(815.000,00)	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	400.000.000,00	401.415.000,00	1.415.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.406.569.000,00	3.069.835.000,00	663.266.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.476.382.000,00	1.620.898.000,00	144.516.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	178.000.000,00	246.750.000,00	68.750.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	752.187.000,00	752.187.000,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	450.000.000,00	450.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	99.100.000,00	107.110.183,12	8.010.183,12	
	4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga	17.600.000,00	14.900.000,00	(2.700.000,00)	
	4.3.3.	Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa	76.500.000,00	83.050.000,00	6.550.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	5.000.000,00	9.160.183,12	4.160.183,12	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.916.884.000,00	3.588.760.183,12	671.876.183,12	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>1.318.752.000,00</u>	<u>1.375.749.208,96</u>	<u>56.997.208,96</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>1.239.752.000,00</u>	<u>1.243.552.000,00</u>	<u>3.800.000,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	59.520.000,00	59.520.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	59.520.000,00	59.520.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	369.624.000,00	369.624.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	369.624.000,00	369.624.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.814.686,80	31.814.686,80	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	31.814.686,80	31.814.686,80	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	182.689.126,84	196.689.126,84	14.000.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	182.689.126,84	196.689.126,84	14.000.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	80.100.000,00	80.100.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	80.100.000,00	80.100.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	5.906.050,96	5.906.050,96	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.906.050,96	5.906.050,96	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	176.648.135,40	176.648.135,40	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	176.648.135,40	176.648.135,40	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	44.250.000,00	44.250.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.250.000,00	44.250.000,00	0,00	
1.1.90		Penyediaan Tambahan Tunjangan Kepala Desa	48.000.000,00	37.800.000,00	(10.200.000,00)	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	48.000.000,00	37.800.000,00	(10.200.000,00)	
1.1.91		Penyediaan Tambahan Tunjangan Perangkat Desa	241.200.000,00	241.200.000,00	0,00	
1.1.91	5.1.	Belanja Pegawai	241.200.000,00	241.200.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	43.974.774,16	70.371.983,12	26.397.208,96	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	31.974.774,16	42.160.000,00	10.185.225,84	
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.160.000,00	4.160.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	31.974.774,16	38.000.000,00	6.025.225,84	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	12.000.000,00	28.211.983,12	16.211.983,12	
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	28.211.983,12	16.211.983,12	
1.3		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	<u>12.455.225,84</u>	<u>28.455.225,84</u>	<u>16.000.000,00</u>	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	12.455.225,84	12.455.225,84	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.455.225,84	12.455.225,84	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	<u>12.570.000,00</u>	<u>23.370.000,00</u>	<u>10.800.000,00</u>	
1.5.01		Sertifikasi Tanah Kas Desa	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	
1.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	10.800.000,00	10.800.000,00	
1.5.06		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	12.570.000,00	12.570.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.570.000,00	12.570.000,00	0,00	
2.		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>997.469.600,00</u>	<u>1.432.900.200,00</u>	<u>435.430.600,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>72.900.000,00</u>	<u>61.200.000,00</u>	<u>(11.700.000,00)</u>	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (i	72.900.000,00	61.200.000,00	(11.700.000,00)	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.900.000,00	61.200.000,00	(11.700.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>285.339.700,00</u>	<u>294.120.800,00</u>	<u>8.781.100,00</u>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	200.028.000,00	208.809.100,00	8.781.100,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.028.000,00	208.809.100,00	8.781.100,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/PrasaranaPosy	85.311.700,00	85.311.700,00	0,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	85.311.700,00	85.311.700,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>629.229.900,00</u>	<u>1.015.147.300,00</u>	<u>385.917.400,00</u>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	200.606.000,00	158.173.900,00	(42.432.100,00)	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	200.606.000,00	158.173.900,00	(42.432.100,00)	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, sel	242.403.700,00	670.753.200,00	428.349.500,00	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	242.403.700,00	670.753.200,00	428.349.500,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *	147.638.200,00	147.638.200,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	147.638.200,00	147.638.200,00	0,00	
2.3.16		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bers</i>	<i>38.582.000,00</i>	<i>38.582.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.3.16	5.3.	Belanja Modal	38.582.000,00	38.582.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>10.000.000,00</u>	<u>62.432.100,00</u>	<u>52.432.100,00</u>	
2.4.01		<i>Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak</i>	<i>10.000.000,00</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>10.000.000,00</i>	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	
2.4.15		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)</i>	<i>0,00</i>	<i>42.432.100,00</i>	<i>42.432.100,00</i>	
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	600.000,00	600.000,00	
2.4.15	5.3.	Belanja Modal	0,00	41.832.100,00	41.832.100,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>201.000.000,00</u>	<u>215.724.774,16</u>	<u>14.724.774,16</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>72.000.000,00</u>	<u>72.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.1.02		<i>Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Per</i>	<i>72.000.000,00</i>	<i>72.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>35.000.000,00</u>	<u>35.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.2.03		<i>Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT</i>	<i>35.000.000,00</i>	<i>35.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>12.000.000,00</u>	<u>12.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.06		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	<i>12.000.000,00</i>	<i>12.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>82.000.000,00</u>	<u>96.724.774,16</u>	<u>14.724.774,16</u>	
3.4.01		<i>Pembinaan Lembaga Adat</i>	<i>25.000.000,00</i>	<i>25.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.4.02		<i>Pembinaan LKMD/LPM/LPMD</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>20.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	<i>37.000.000,00</i>	<i>37.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.000.000,00	37.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.4.04		<i>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</i>	0,00	14.724.774,16	14.724.774,16	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	14.724.774,16	14.724.774,16	
4.		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>138.833.000,00</u>	<u>357.386.000,00</u>	<u>218.553.000,00</u>	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>126.447.000,00</u>	<u>325.000.000,00</u>	<u>198.553.000,00</u>	
4.2.03		<i>Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)</i>	<u>126.447.000,00</u>	<u>325.000.000,00</u>	<u>198.553.000,00</u>	
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	207.445.316,00	207.445.316,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	126.447.000,00	117.554.684,00	(8.892.316,00)	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>12.386.000,00</u>	<u>12.386.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.03		<i>Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)</i>	<u>12.386.000,00</u>	<u>12.386.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.386.000,00	12.386.000,00	0,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>0,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	
4.5.02		<i>Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kope</i>	<u>0,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	<u>20.000.000,00</u>	
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>92.000.000,00</u>	<u>82.000.000,00</u>	<u>(10.000.000,00)</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>20.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>(10.000.000,00)</u>	
5.1.00		<i>Kegiatan Penanggulangan Bencana</i>	<u>20.000.000,00</u>	<u>10.000.000,00</u>	<u>(10.000.000,00)</u>	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	20.000.000,00	10.000.000,00	(10.000.000,00)	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>72.000.000,00</u>	<u>72.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		<i>Penanganan Keadaan Mendesak</i>	<u>72.000.000,00</u>	<u>72.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	
JUMLAH BELANJA			2.748.054.600,00	3.463.760.183,12	715.705.583,12	
SURPLUS / (DEFISIT)			168.829.400,00	125.000.000,00	(43.829.400,00)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	57.534.336,93	57.534.336,93	0,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	57.534.336,93	57.534.336,93	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	226.363.736,93	182.534.336,93	(43.829.400,00)	
	6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	226.363.736,93	182.534.336,93	(43.829.400,00)	
		PEMBIAYAAN NETTC	(168.829.400,00)	(125.000.000,00)	(43.829.400,00)	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

PANDESARI, 11 November 2024

KEPALA DESA PANDESARI

H. MUDAWAM